

PERAN USAHA TKI PURNA TERHADAP PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN USAHA TKI PURNA DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Tavi Supriana^{*)} dan Vita Lestari Nasution

Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, Medan 20155, Indonesia

^{*)}E-mail: tavihutasuhut@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan usaha TKI Purna (Tenaga kerja Indonesia yang sudah kembali ke tanah air) terhadap perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan ekonomi rakyat, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan usaha TKI Purna. Penelitian dilakukan di Provinsi Sumatera Utara. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TKI Purna berperan terhadap perluasan kesempatan kerja. Dengan asumsi setiap TKI yang ditempatkan membuka usaha, tingkat pengangguran di Sumatera Utara tahun 2008 berkurang sebesar 20,53%; usaha TKI Purna berperan terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat di bidang jasa, industri, perdagangan, dan pertanian/peternakan serta berperan dalam pengembangan ekonomi lokal (*Local Economic Development/LED*); usaha TKI Purna menciptakan pendapatan baik untuk pengusaha maupun pekerja dan sektor-sektor lain yang mendukungnya. Selain itu, dana remitansi yang dikirimkan oleh TKI dari luar negeri secara makro mampu menggerakkan perekonomian di perdesaan. Pendapatan dari usaha dan dana remitansi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Variabel modal dan tenaga kerja berpengaruh terhadap pendapatan usaha TKI Purna, penambahan modal sebesar Rp1.000.000,00 akan meningkatkan pendapatan sebesar Rp201.000,00 per bulan dan penambahan tenaga kerja sebanyak 1 orang akan meningkatkan pendapatan sebesar Rp44.757,562 per bulan. Tingkat pendidikan pengusaha, lamanya mendapat bimbingan teknis, dan pembinaan lanjutan tidak berpengaruh terhadap pendapatan usaha TKI Purna. Implikasinya model pembinaan teknis dan pembinaan lanjutan yang selama ini dilakukan pemerintah terhadap TKI Purna harus dikaji kembali.

The Role of Ex-Migrant Worker Enterprise Toward Local Economic Development and Factors that Influence Income of Ex-Migrant Enterprise in Sumatera Utara Province

Abstract

The objective of research are: to analyze the role of the small scale enterprise of the ex-migrant workers towards the development of job opportunities and the empowerment of local economy as well as to analyze several factors that influence ex-migrant workers enterprise income. The research was carried out in North Sumatera Province. The descriptive analysis and the multiple linear regression analysis are used to analyze the data. The result of the research shows the small scale enterprise of the ex-migrant workers have important role for creating job opportunities. With assumption - every ex-migrant workers run a business and recruit minimum one worker - so the unemployment decrease as many as 123.226 people or 20,53% of the total unemployment in North Sumatera. The ex-migrant workers also have a role in the empowerment of the people economy. They work in the micro, small, medium enterprise which is the pillar of the national economy. The result of the research also shows that capital and the number of workers employed influence the income of ex-migrant enterprise. The addition capital of Rp1,000,000,00 will raise as much as Rp201,000.00 of income, and the addition of 1 worker will raise income as much as Rp44,757.562. Education, technical supporting and advance supporting done by government did not influence the income of ex-migrant enterprise. The implication is, government need to initiate the new model of technical supporting and advance supporting for ex-migrant enterprise.

Keywords: ex-migrant worker, income of ex-migrant enterprise, job opportunities, public economy

1. Pendahuluan

Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya migrasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Salah satu faktor penarik yang menyebabkan TKI ke luar negeri adalah upah yang lebih tinggi. Faktor lain adalah faktor pendorong yang ada di dalam negeri. Faktor pendorong ini adalah situasi pasar tenaga kerja domestik yang kelebihan suplai. Situasi ketenagakerjaan di Indonesia masih ditandai dengan tingginya tingkat pengangguran terbuka dan masih lambatnya daya serap tenaga kerja di lapangan kerja formal. Lapangan kerja yang cukup tersedia adalah di sektor informal. Lapangan kerja di sektor informal umumnya dicirikan dengan produktivitas dan pendapatan yang rendah. Rendahnya produktivitas dan pendapatan menjadi penyebab utama tenaga kerja mencari alternatif lain, yakni bekerja di luar negeri.

Struktur pasar tenaga kerja domestik ditandai dengan tingginya jumlah pengangguran terbuka. Pengangguran di Indonesia masih diwarnai oleh besarnya kelompok usia muda dan berpendidikan rendah. Sampai Februari 2006, karakteristik pengangguran terbuka didominasi oleh kelompok usia muda (15–24 tahun) berjumlah 6,9 juta orang atau 61,8% dari jumlah pengangguran terbuka yang berjumlah 11,1 juta orang. Pengangguran terbuka juga didominasi oleh kelompok tingkat pendidikan Sekolah Tingkat Pertama (SMTP) kebawah, yaitu sebesar 6,4 juta orang atau 57,5%. Sebagian besar pengangguran berada di daerah perkotaan, yaitu sebesar 5,8 juta orang atau sekitar 52,4%. Namun demikian, terdapat kecenderungan meningkatnya jumlah pengangguran terbuka di daerah perdesaan selama kurun waktu 5 tahun belakangan.

Di samping permasalahan pengangguran terbuka, jumlah pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu juga terus meningkat. Pada Agustus 2004 sebesar 29,8% meningkat menjadi 31,2% pada Februari 2005, dan 31,4% pada Februari 2006. Fenomena ini mencerminkan lapangan kerja yang tersedia kurang produktif yang menyebabkan mereka berpendapatan rendah.

Program penempatan tenaga kerja ke luar negeri adalah salah satu alternatif untuk mengurangi pengangguran di dalam negeri. Penempatan tenaga kerja ke luar negeri mempunyai manfaat ganda. Bagi TKI, bekerja ke luar negeri merupakan cara untuk memperoleh pekerjaan, penghasilan, meningkatkan kesejahteraan dan mengembangkan ketrampilan. Bagi pemerintah, program ini merupakan alternatif strategis mengurangi pengangguran di dalam negeri, memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan perolehan devisa.

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja ke luar negeri hampir 75% bekerja di sektor informal seperti

penatalaksana rumah tangga, pengasuh bayi dan balita, serta perawat orang lanjut usia (jompo). TKI yang bekerja di sektor formal seperti di perkebunan kelapa sawit, industri dan jasa perdagangan hanya sekitar 25%. TKI yang bekerja di sektor formal relatif rendah disebabkan oleh tingkat pendidikan TKI. Hal ini berhubungan dengan struktur pasar tenaga kerja domestik.

Tenaga kerja Indonesia memberikan sumbangan yang signifikan dalam Neraca Pembayaran Indonesia (NPI). Menurut data tahun 2007, penerimaan devisa dari remitansi TKI secara nasional diperkirakan mencapai 5,9 miliar dolar AS atau ekuivalen dengan 27,6% dari total *income & current transfer* yang tercantum dalam NPI. Remitansi ini mencapai 8,24 miliar dolar AS atau setara dengan 80,24 triliun rupiah pada tahun 2008. Nilai ini belum mencakup remitansi yang tidak tercatat karena dikirim melalui teman atau dibawa sendiri. Remitansi ini selanjutnya bisa memiliki dampak ganda terhadap perekonomian. Remitansi digunakan untuk membangun rumah dan membuka usaha bagi keluarga yang ada di tanah air, dan sebagian ditabung untuk modal usaha setelah kontrak kerja di luar negeri berakhir.

Hasil penelitian Faiqoh (2009), menunjukkan pengaruh dari aliran dana remitansi terhadap kegiatan ekonomi dan sosial daerah Keresidenan Kedu, Semarang, Pekalongan, Solo dan Pati. Terdapat enam faktor yang memberi pengaruh terhadap kegunaan tabungan yang dimiliki TKI. Faktor yang mempengaruhi aliran dana remitansi adalah jumlah tanggungan, pendidikan terakhir, negara tempat bekerja, jenis pekerjaan, penghasilan dan pengeluaran selama di luar negeri. Faktor yang paling berpengaruh adalah tanggungan, jenis pekerjaan dan pengeluaran selama di luar negeri. Nilai estimasi probabilitas terbesar kegunaan tabungan adalah untuk biaya nikah dan biaya untuk menjadi TKI kembali.

Hasil penelitian Teviana (2002) terhadap TKI wanita di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa mayoritas TKI berpendidikan rendah. Pekerjaan di Malaysia adalah pembantu rumah tangga dan buruh pabrik. Namun terdapat juga pekerja yang bekerja sebagai guru dan pedagang. Motivasi bekerja adalah untuk memperoleh penghasilan yang lebih baik. Remitansi yang dikirim ke tanah air dipergunakan untuk membantu biaya pendidikan dan usaha keluarga, membangun rumah dan konsumsi keluarga. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan jenis pekerjaan.

Hasil survei nasional pola remitansi TKI di Nusa Tenggara Barat tahun 2008, menunjukkan sebagian besar remitansi TKI yang dikirim ke Indonesia ternyata digunakan untuk membayar hutang. Hutang ini adalah biaya yang mereka pergunakan untuk membiayai keberangkatan mereka sebagai TKI. Mayoritas TKI,

(84%) merasa menjadi TKI bisa membuat kondisi ekonomi keluarga mereka menjadi lebih baik. Hal tersebut dicapai dengan menyisihkan dana untuk modal usaha, membeli lahan, membangun rumah, dan lainnya. Motivasi TKI pada umumnya seragam yakni mencari penghasilan yang lebih baik. Masih rendahnya pendidikan TKI menyebabkan sebagian besar dari mereka bekerja di sektor informal, yaitu sebagai buruh perkebunan dan pembantu rumah tangga (Bank Indonesia, 2008).

Hasil survei TKI di wilayah Nunukan dalam rangka survei nasional pola remitansi TKI tahun 2008, menunjukkan bahwa 44% responden merupakan pekerja perkebunan, 17% sebagai pembantu rumah tangga, 12% pekerja pabrik. Sisanya bekerja pada beragam pekerjaan: sebagai pengasuh anak, sopir, buruh konstruksi, penjaga toko atau rumah makan hingga tukang masak. Dari segi penghasilan, gaji yang diterima setiap bulan bervariasi mulai dari RM 200 (Rp560.000,00) hingga RM 1200 (Rp3.360.000,00), dengan rata-rata sebesar Rp1.400.000,00. Sebagian besar responden (67%) menyimpan sendiri gaji yang diterimanya dan hanya 7% responden yang menyimpan di bank. Selebihnya (8%) menitipkan kepada majikan dan 18% tidak jelas (Bank Indonesia, 2008).

Dilihat dari penggunaannya, sebagian pendapatan TKI tersebut dialokasikan untuk biaya hidup di Malaysia, rata-rata Rp600.000,00/bulan. Kemudian sisanya ditabung sendiri oleh TKI atau dikirimkan ke Indonesia. Sebagian besar responden (60%) mengaku menabung penghasilannya dengan jumlah tabungan rata-rata Rp625.000,00/bulan. Sejumlah 62% responden mengatakan mereka mengirim sebagian pendapatan untuk keluarga di Indonesia dengan nominal mendekati Rp540.000,00/bulan.

Kajian-kajian TKI yang dilakukan umumnya masih dititik beratkan pada pola remitansi, penggunaan remitansi dan motivasi TKI untuk bekerja di luar negeri. Kajian mengenai usaha TKI sesudah kembali ke tanah air (TKI Purna) sangat sedikit ditemui. Sejalan dengan semakin meningkatnya peran TKI dalam perekonomian nasional, kajian ini diperlukan untuk melengkapi literatur tentang TKI di Indonesia dan pola pemberdayaannya.

Bagi TKI yang telah kembali ke tanah air (TKI Purna), tabungan dari penghasilan selama bekerja dapat digunakan sebagai modal untuk membuka usaha di tanah air. Usaha ini akan membuka lapangan kerja baru di lingkungan keluarga. Tidak sedikit TKI Purna yang berhasil mengelola usaha dengan baik dan dapat berkembang sehingga dapat menyerap tenaga kerja dari daerah sekitarnya.

Menurut Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Mataram (2009),

sejumlah TKI Purna di Lombok memiliki usaha yang sukses. Usaha yang sukses ini tidak terlepas dari program kemitraan dengan sejumlah perusahaan seperti PT. Bulkas Mitra Sukses. Usaha TKI Purna ini memerlukan penguatan dana untuk pengembangannya. Upaya yang dapat dilakukan untuk memperoleh akses ke lembaga perbankan adalah mendaftarkan usaha ke kantor Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) di Mataram. Formalitas pendaftaran ini bertujuan untuk mendapatkan rekomendasi dari BP3TKI. Rekomendasi ini akan membuka akses pengusaha TKI Purna untuk memperoleh dana dari perbankan.

Efektivitas pembinaan TKI Purna yang selama ini dilakukan BNP2TKI belum optimal. Program pembekalan kewirausahaan sebaiknya dilakukan sebelum berangkat. Dengan memasukkan materi kewirausahaan pada program persiapan akhir pemberangkatan (PAP) akan membuka wawasan calon TKI lebih dini. Dengan terbukanya wawasan calon TKI lebih awal, maka mereka tidak akan boros membelanjakan uangnya dan akan menginvestasikan kirimannya itu pada sektor-sektor produktif ketimbang konsumtif. Efektivitas program kewirausahaan dipengaruhi oleh tutor yang memberikan materi pembekalan. Tutor yang berpengalaman dapat mendorong perubahan sikap dan mental dari calon TKI agar mereka tidak takut memasuki dunia bisnis.

Remitansi dan usaha TKI Purna dapat memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi ekonomi wilayah asal TKI. Pemerintah memberikan dorongan dan insentif untuk memberdayakan usaha ini melalui upaya pembinaan dan pemberdayaan. Upaya pembinaan dan pemberdayaan dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai program antara lain program bimbingan wirausaha, program pengembangan usaha, pendampingan, dan membangun akses untuk memperoleh kredit modal perbankan. Selain itu pemerintah telah berupaya mendorong terbentuknya Asosiasi TKI Purna. Asosiasi ini dimaksudkan sebagai wadah integrasi dan konsultasi TKI Purna dalam meningkatkan dan mengembangkan potensi dan usaha yang mereka miliki.

Sejauh mana usaha yang dilakukan pemerintah ini telah mampu meningkatkan pendapatan pengusaha TKI Purna, dan seberapa besar peran usaha TKI Purna terhadap pengembangan ekonomi rakyat di Sumatera Utara belum banyak dikaji. Dengan penelitian ini diharapkan dapat diketahui seberapa besar usaha TKI Purna mempunyai peranan terhadap perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan usaha TKI Purna.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan permasalahan yang akan dikaji adalah: (a) bagaimana

peranan usaha TKI Purna terhadap perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan ekonomi rakyat di Provinsi Sumatera Utara; (b) faktor-faktor apa yang mempengaruhi pendapatan usaha TKI Purna?

2. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan di Provinsi Sumatera Utara. Data yang diperoleh dari Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Sumatera Utara menunjukkan bahwa usaha TKI Purna tersebar di 9 kabupaten/kota. Sampel dipilih sebanyak 3 kabupaten/kota yang memiliki usaha TKI Purna terbanyak yaitu Kabupaten Langkat, Kota Madya Binjai, dan Kota Madya Medan. Populasi dalam penelitian ini adalah TKI Purna yang sudah membuka usaha di tiga kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yaitu sebanyak 107 orang. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah metode sensus. Seluruh populasi pengusaha pada 3 Kabupaten/Kota terpilih akan dijadikan sampel.

Data yang digunakan dalam kajian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder yang dibutuhkan diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), BP3TKI, dan Bank Indonesia. Data primer diperoleh dengan metode survei ke lokasi penelitian melalui wawancara dengan pengusaha TKI purna menggunakan kuesioner yang telah disiapkan.

Peranan usaha TKI Purna terhadap perluasan kesempatan kerja dilihat dari jumlah tenaga kerja yang diserap oleh usaha yang dilakukan oleh TKI Purna. Peranan usaha TKI Purna terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat dilihat dari jenis bidang usaha yang dominan diusahakan oleh TKI Purna. Usaha TKI Purna akan dikelompokkan berdasarkan kriteria BPS dalam kegiatan Sensus Ekonomi 2006 (SE 06) sebagai berikut: (a) untuk sektor industri pengelompokan berdasarkan jumlah tenaga kerja yakni usaha mikro dengan jumlah tenaga kerja 1-4 orang, usaha kecil dengan jumlah tenaga kerja 5-19 orang, usaha menengah, dengan jumlah tenaga kerja 20-99 orang, dan usaha besar dengan jumlah tenaga kerja >100 orang; (b) untuk kegiatan usaha di luar sektor industri pengelompokan dilakukan berdasarkan pendapatan, yaitu usaha mikro dengan pendapatan < Rp50 juta, usaha kecil dengan pendapatan usaha antara Rp50 juta sampai Rp1 miliar, usaha menengah dengan pendapatan usaha antara Rp1-3 miliar.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan usaha TKI Purna dianalisis dengan analisis regresi linier berganda dengan persamaan:

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4D + b_5X_5 + \epsilon_i \quad (1)$$

dimana Y adalah pendapatan usaha (Rp/bulan), X_1 adalah pendidikan TKI Purna (tahun), X_2 adalah lamanya mendapat bimbingan teknis (hari), X_3 adalah modal (Rp), D adalah pembinaan lanjutan sebagai

Tabel 1. Data TKI Purna yang Sudah Membuka Usaha Tahun 2007

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah (orang)
1.	Medan	13
2.	Deli Serdang	9
3.	Serdang Bedagai	7
4.	Binjai	64
5.	Labuhan Batu	5
6.	Langkat	30
7.	Asahan	1
8.	Simalungun	10
9.	Pematang Siantar	1
Total		140

Sumber: BP3TKI Sumatera Utara, (2008)

variabel *dummy* dengan nilai 1 bila TKI Purna mengikuti pembinaan lanjutan dan nilai 0 bila TKI Purna tidak mengikuti pembinaan lanjutan, dan X_5 adalah jumlah tenaga kerja (orang).

Untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial digunakan uji-t. Untuk melihat pengaruh variabel independen secara serempak digunakan uji-F. Untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan variabel dependen digunakan koefisien determinasi (R^2).

Untuk menghasilkan hasil estimasi yang BLUE (*best linear unbiased estimation*), maka terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik, yaitu uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Uji Multikolinearitas dalam model dilihat dari korelasi antar variabel independen. Jika korelasi $\geq 0,8$ maka dapat dikatakan terjadi multikolinieritas dalam model. Uji heteroskedastisitas dilihat dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik, dimana sumbu X adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu Y adalah residual yang telah *distudentized*. Jika ada pola tertentu, misalnya titik (*point-point*) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas, tetapi jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan analisis grafik, yaitu melihat histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal (Koutsoyiannis, 1977).

3. Hasil dan Pembahasan

Responden berjumlah 107 orang TKI Purna yang membuka usaha yang terdiri dari 13 orang membuka usaha di Kota Medan, 64 orang di Kota Binjai, dan 30 orang di Kabupaten Langkat. Responden dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 49 orang (45,8%) dan

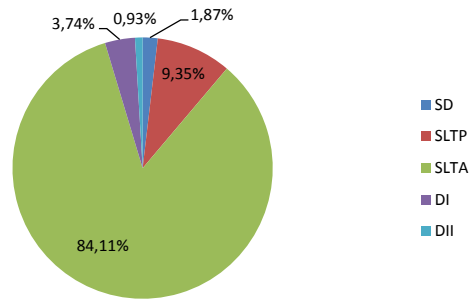
perempuan 58 orang (54,2%). TKI purna yang berusaha ternyata masih didominasi oleh perempuan. Responden yang membuka usaha didominasi kelompok umur produktif, yaitu 26-30 tahun sebanyak 47 orang (43,9%), dan 31-35 tahun (33,6%). Jika dilihat dari usia ini, berarti ketika bekerja di luar negeri TKI ini sedang dalam usia produktif (Gambar 1).

Dari sisi pendidikan, TKI dari Sumatera Utara relatif lebih baik dibandingkan dengan tingkat pendidikan TKI Indonesia. Mayoritas responden mempunyai tingkat pendidikan SLTA, yaitu sebanyak 90 orang (84,1%) dan paling sedikit pada tingkat pendidikan DII yaitu 1 orang (0,9%). Responden yang menduduki tingkat pendidikan SD hanya 2 orang (1,9%) (Gambar 2).

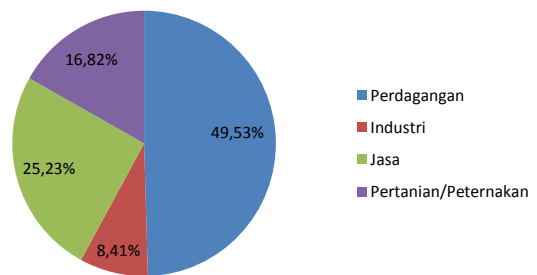
Bidang/sektor usaha yang paling banyak digeluti oleh TKI Purna adalah bidang perdagangan, yaitu 53 orang (49,5%), bidang usaha jasa 27 orang (25,2%), bidang pertanian/peternakan 18 orang (16,8%) dan paling sedikit pada bidang/sektor industri 9 orang (8,4%) (Gambar 3).

Modal usaha awal yang digunakan oleh TKI purna bervariasi. Mayoritas responden menggunakan modal awal usaha lebih kecil dari Rp5.000.000,00 yaitu sebanyak 55 orang (51,4%). Responden yang menggunakan modal Rp5.000.000,00–10.000.000,00 sebanyak 39 orang (36,5%) dan responden yang menggunakan modal awal lebih besar dari Rp45.000.000,00 hanya sebanyak 2 orang (1,9%) (Gambar 4).

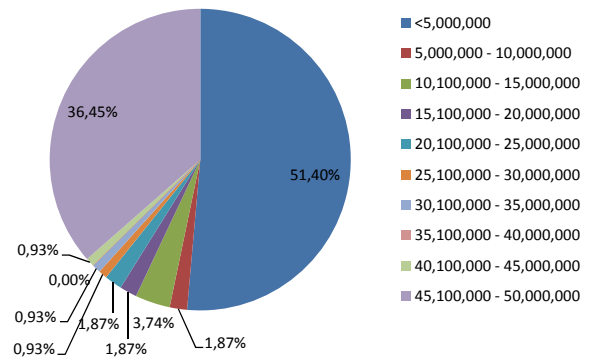
Pendapatan yang diperoleh dari usaha TKI purna juga bervariasi. Rentang pendapatan usaha Rp1.000.000,00–5.000.000,00 adalah rentang pendapatan yang paling banyak diperoleh TKI Purna dengan jumlah 81 orang (75,7%). Jumlah TKI Purna yang memperoleh pendapatan lebih Rp5.000.000,00 hanya sebanyak 5 orang (4,67%) dan TKI Purna yang memperoleh pendapatan kurang Rp1.000.000,00 sebanyak 21 orang (19,6%) (Gambar 5). Dengan kriteria yang digunakan BPS, maka usaha yang dilakukan TKI purna seluruhnya dapat dikelompokkan ke dalam usaha mikro.



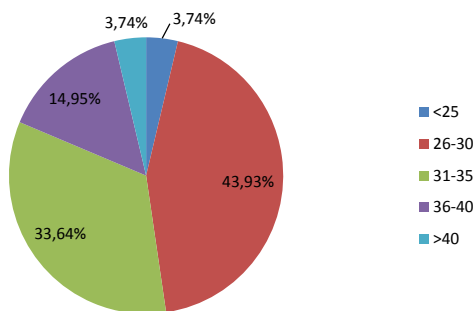
Gambar 2. Diagram Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan



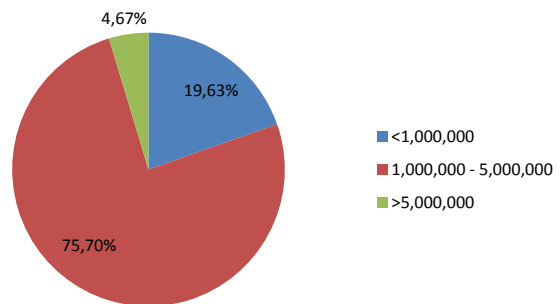
Gambar 3. Diagram Distribusi Responden Berdasarkan Bidang Usaha



Gambar 4. Diagram Distribusi Responden Berdasarkan Modal Usaha



Gambar 1. Diagram Distribusi Responden Berdasarkan Umur



Gambar 5. Diagram Distribusi Responden Berdasarkan Pendapatan Usaha

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang penting dalam proses produksi. Tenaga kerja akan berpengaruh terhadap jumlah produksi yang dihasilkan, baik dalam jumlah penggunaannya maupun kualitasnya. Dalam usaha TKI Purna, tenaga kerja yang digunakan berasal dari dalam maupun dari luar keluarga. Dari hasil wawancara dengan 107 orang TKI Purna yang sudah membuka usaha, diketahui bahwa rata-rata tenaga kerja yang digunakan sebanyak 3 orang dengan total tenaga kerja sebanyak 294 orang. Jika jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan ditambahkan jumlah TKI Purna-nya sendiri, maka usaha TKI Purna sudah mampu menyerap 401 orang tenaga kerja.

Jumlah pengangguran yang terdaftar di Sumatera Utara pada tahun 2006 mencapai 600.095 jiwa (BPS, 2008). Sementara itu, dari tahun 2004 hingga tahun 2008, jumlah TKI yang ditempatkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebanyak 61.613 orang. Apabila diasumsikan TKI tersebut kembali dari luar negeri dan mempergunakan sebagian penghasilan yang mereka peroleh sebagai modal untuk membuka usaha, maka minimal 61.613 orang pekerja dapat diserap. Apabila setiap TKI mempekerjakan tenaga kerja minimal 1 orang saja, maka mereka sudah mampu mengurangi pengangguran sebanyak 123.226 orang. Dengan terbukanya peluang kerja ini, maka pengangguran di Sumatera Utara akan berkurang sebesar 20,5%. Angka ini cukup signifikan dalam mengatasi masalah pengangguran di Sumatera Utara. Dengan asumsi ini, maka program pembinaan usaha TKI purna yang telah dilakukan oleh pemerintah dapat membuka peluang kerja yang cukup besar.

Usaha yang dijalankan oleh TKI Purna bergerak di berbagai bidang yaitu perdagangan, industri, jasa, dan pertanian/peternakan. Dari 107 orang responden, sebanyak 53 orang bergerak di bidang/sector perdagangan dengan penyebaran 8 orang di Kota Medan, 32 orang di Kota Binjai, dan 13 orang di Kabupaten Langkat. Responden yang berusaha di bidang industri sebanyak 9 orang dengan penyebaran 1 orang di Kota Medan, 5 orang di Kota Binjai, dan 3 orang di Kabupaten Langkat. Penyebaran responden berdasarkan jenis usaha dan asal kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 2.

Bidang usaha yang paling banyak dijalankan adalah bidang perdagangan dengan jenis usaha antara lain kedai kelontong, usaha ayam potong, dagang bakso, kedai sembako, dagang pakaian dan lain-lain. Dalam bidang industri, jenis usaha yang dijalankan meliputi usaha pembuatan roti, pembuatan tepung sagu, kilang kecap, keripik dan tempe, kerajinan bambu dan pembuatan opak. Dalam bidang jasa, jenis usaha yang dijalankan meliputi tukang pangkas, salon, bengkel, menjahit, foto keliling, *doorsmeer* sepeda motor, dan warung telepon. Dalam bidang pertanian/peternakan,

Tabel 2. Penyebaran Responden Berdasarkan Jenis Usaha dan Asal Kabupaten/Kota

Bidang/Sektor Usaha	Kab/Kota						Total
	Medan		Binjai		Langkat		
	Total	%*	Total	%	Total	%	
Perdagangan	8	15,1	32	60,4	13	24,5	53
Industri	1	11,1	5	55,6	3	33,3	9
Jasa	8	29,6	13	48,2	6	22,2	27
Pertanian/ Peternakan	0	0,0	5	27,8	13	72,2	18
Total	17	15,9	55	51,4	35	32,7	107

* Persentase masing-masing sektor usaha

Tabel 3. Jumlah Penerimaan Remitansi TKI Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2004-2008

Tahun	Jumlah Remitansi (Rp)
2004	6.689.605.000,00
2005	11.307.714.250,00
2006	12.112.679.500,00
2007	9.006.800.200,00
2008	9.644.692.910,00

Sumber: BP3TKI Sumatera Utara Tahun 2008

usaha yang dijalankan meliputi usaha kebun jambu, usaha tani padi dan palawija, ternak babi, belut, kambing, bebek dan ternak ayam.

Apabila dilihat dari jenis, jumlah tenaga kerja dan pendapatan usaha, maka usaha yang dijalankan oleh TKI Purna dapat dikategorikan sebagai kegiatan usaha perekonomian rakyat dengan skala usaha mikro dan kecil. Perekonomian rakyat mempunyai peran dalam strategi pembangunan dan sebagai sokoguru ekonomi nasional yang merupakan upaya strategis agar ekonomi nasional tumbuh dan berakar di dalam negeri. Krisis moneter tahun 1998 dan krisis tahun 2008 menunjukkan banyak perusahaan-perusahaan berskala besar terpuruk.

Usaha berskala mikro dan kecil yang disebut sebagai sektor ekonomi kerakyatan secara rata-rata masih mampu tumbuh sebesar 7,1% per tahun selama periode 1997-2003, sedangkan usaha besar hanya tumbuh sebesar 0,9%.

Perekonomian rakyat juga mempunyai peran untuk pengembangan ekonomi lokal (*Local Economic Development/LED*) karena usaha TKI Purna telah mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan menyerap tenaga kerja. Hal ini telah sesuai dengan tujuan dan sasaran pengembangan ekonomi lokal (*Local Economic Development/LED*) antara lain:

- Terwujudnya pengembangan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah secara ekonomis dan berkelanjutan.
- Terlaksananya upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal melalui pelibatan pemerintah, dunia

usaha, masyarakat lokal dan organisasi masyarakat madani dalam suatu proses yang partisipatif.

- c. Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat, berkurangnya pengangguran, menurunnya tingkat kemiskinan.

Jika dilihat dari sisi remitansi TKI yang masih berada di luar negeri, maka nilai yang diperoleh cukup besar. Jumlah remitansi TKI dari Sumatera Utara (Tabel 3) cukup besar. Dana remitansi ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka di daerah asalnya seperti pendidikan, konsumsi, pembangunan rumah, dan lain-lain. Secara makro, semua kegunaan ini akan mampu menggerakkan perekonomian di perdesaan dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil analisis pengaruh pendidikan pengusaha, lamanya mendapat bimbingan teknis (Bimtek), jumlah modal, pembinaan lanjutan, dan tenaga kerja terhadap pendapatan usaha TKI Purna dapat dilihat pada Tabel 4.

Hasil estimasi persamaan regresi yang diperoleh:

$$Y = 104.693,067 + 25.624,077 \text{ Pendidikan} + 66.385,425 \text{ Lamanya Mendapat Bimtek} + 0,201 \text{ Modal} + 219.195,046 \text{ Pembinaan Lanjutan} + 44.757,562 \text{ Tenaga Kerja} \quad (2)$$

Koefisien determinasi adalah 0,580 artinya sebesar 58% variasi perubahan variabel pendapatan mampu dijelaskan oleh variasi perubahan variabel pendidikan pengusaha, lamanya mendapat Bimtek, modal, pembinaan lanjutan, dan tenaga kerja. Sisanya sebesar 42% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti di dalam penelitian ini.

Variabel lain yang tidak diteliti namun mempengaruhi pendapatan usaha TKI Purna adalah jumlah produksi yang dihasilkan dan harga. Produksi yang dihasilkan sangat bergantung pada jumlah permintaan. Variabel-variabel ini tidak dianalisis karena merupakan variabel eksternal yang tidak dapat dikuasai oleh pengusaha. Menurut Rosid (2009) kedua faktor ini merupakan dua

Tabel 4. Hasil Analisis Pengaruh Pendidikan Pengusaha, Lamanya Mendapat Bimbingan Teknis, Modal, Pembinaan Lanjutan, dan Tenaga Kerja terhadap Pendapatan Usaha TKI Purna

Variabel	Koefisien Regresi	t_{hitung}	Signifikansi
Konstanta	104693,067	0,064	0,949
X ₁ (Pendidikan TKI Purna)	25624,077	0,185	0,854
X ₂ (Lamanya Mendapat Bimtek)	66385,425	0,907	0,366
X ₃ (Modal)	0,201	10,254	0,000
X ₄ (Pembinaan Lanjutan)	219195,046	0,465	0,643
X ₅ (Tenaga Kerja)	44757,562	2,029	0,045
$F_{\text{hitung}} = 27,935$			
$F_{0,05(5;101)} = 2,30$			
$T_{(0,05;101)} = 1,9$			
$R^2 = 0,580$			

variabel yang menjadi kendala bagi berkembangnya usaha kecil. Umumnya usaha kecil mempunyai jaringan yang terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah.

Dari Tabel 4 juga dapat dilihat bahwa secara serempak variabel pendidikan pengusaha, lamanya mendapat Bimtek, modal, pembinaan lanjutan, dan tenaga kerja berpengaruh nyata terhadap pendapatan usaha TKI Purna. Hal ini dapat dilihat dari nilai F_{hitung} sebesar 27,935 yang lebih besar dari nilai $F_{0,05(5;101)}$ sebesar 2,30. Hal ini juga dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari nilai α sebesar 0,05.

Hasil uji asumsi klasik menunjukkan tidak terjadi multikolinieritas dalam model. Hasil analisis korelasi antara variabel independen menunjukkan tidak ada korelasi yang tinggi diantara variabel independen. Hasil analisis uji heteroskedastisitas menunjukkan titik-titik tidak menyebar secara acak. Hal ini berarti terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Heteroskedastisitas ini terjadi karena variasi data modal dan pendapatan usaha yang cukup besar sehingga terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Namun ini tidak berpengaruh terhadap model karena uji normalitas terpenuhi. Grafik histogram menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.

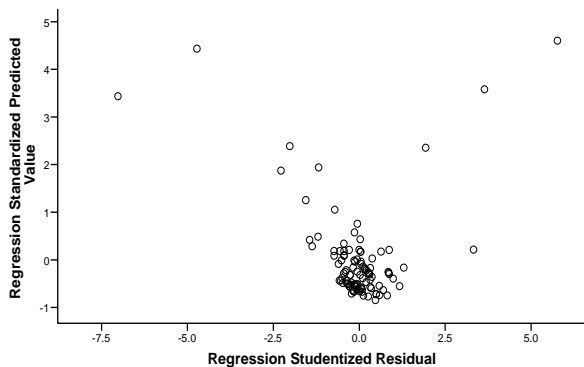
Secara parsial pengaruh masing-masing variabel dijelaskan sebagai berikut: Variabel pendidikan pengusaha tidak berpengaruh nyata terhadap pendapatan usaha TKI Purna. Hal ini dapat dilihat dari nilai t_{hitung} sebesar 0,185 yang lebih kecil dari nilai $t_{(0,05;101)}$ sebesar 1,9. Pendidikan tidak berpengaruh nyata disebabkan karena secara umum usaha yang dimiliki TKI purna tidak berkaitan dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki. Tingkat pendidikan TKI Purna yang terbanyak adalah tingkat SMA/SLTA. Tingkat pendidikan ini merupakan tingkat pendidikan formal umum, bukan pendidikan kejuruan yang berhubungan/diperlukan secara langsung terhadap usaha yang mereka jalankan.

Variabel lamanya mendapat pembinaan teknis (Bimtek) tidak berpengaruh nyata terhadap pendapatan usaha TKI Purna. Hal ini dapat dilihat dari nilai t_{hitung} sebesar 0,185 yang lebih kecil dari nilai $t_{(0,05;101)}$ sebesar 1,9. Lamanya mendapat Bimtek tidak berpengaruh nyata disebabkan karena materi yang diberikan pada bimtek adalah materi-materi yang umum untuk menjalankan usaha bukan materi yang spesifik sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan oleh TKI Purna. Bimtek diberikan bertujuan untuk mengubah pola pikir TKI Purna agar memanfaatkan uang yang mereka peroleh dari luar negeri untuk membuka usaha dan bukan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif. Lamanya mendapat Bimtek tidak berpengaruh nyata juga disebabkan karena waktu pelatihan terlalu singkat, hanya 3 atau 4 hari. Jika dikaitkan variabel tingkat pendidikan dimana pendidikan

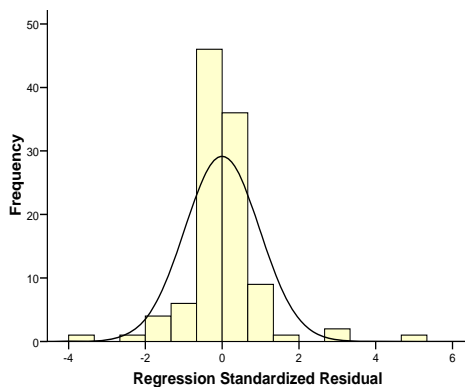
yang dimiliki TKI bersifat umum dan bukan kejuruan, maka Bimtek menjadi sangat penting bagi pengusaha. Model pembimbingan yang terbaik mungkin perlu dikaji lebih dalam.

Variabel modal berpengaruh nyata terhadap pendapatan usaha TKI Purna. Hal ini dapat dilihat dari nilai t_{hitung} sebesar 10,254 yang lebih besar dari nilai $t_{(0,05;101)}$ sebesar 1,9. Teori produksi yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan hasil produksi yang lebih besar maka dibutuhkan jumlah modal yang lebih besar pula. Semakin besar modal yang diinvestasikan, maka akan semakin besar skala usaha yang bisa dijalankan oleh TKI Purna. Semakin besar skala usaha, maka akan semakin besar pendapatan yang diperoleh. Koefisien regresi sebesar 0,201 berarti setiap penambahan modal sebesar Rp1.000.000,00 maka pendapatan akan bertambah sebesar Rp201.000,00 per bulan.

Hasil penelitian menunjukkan akses TKI Purna terhadap sumber permodalan masih sangat kecil. Dari hasil wawancara diketahui bahwa dari 107 responden, hanya 25 orang (23,36%) yang mendapat bantuan kredit. Jumlah bantuan yang diterima oleh sebagian responden juga dirasakan masih terlalu kecil. Sumber kredit (Tabel 5) juga masih terbatas. Sampai saat ini, lembaga pemberi kredit yang terlibat adalah LP2KM, Bank Mandiri, Bank BNI 46, Bank BRI, dan Jamsostek.



Gambar 6. Scatterplot Uji Heteroskedastisitas



Gambar 7. Histogram Uji Normalitas Data

Faktor yang menyebabkan sulitnya memperoleh bantuan modal adalah manajemen keuangan usaha yang belum memenuhi standar untuk memperoleh kredit dari bank.

Variabel pembinaan lanjutan tidak berpengaruh nyata terhadap pendapatan usaha TKI Purna. Hal ini dapat dilihat dari nilai t_{hitung} sebesar 0,34 yang lebih kecil dari nilai $t_{(0,05;101)}$ sebesar 1,9. Pembinaan lanjutan tidak berpengaruh nyata karena pembinaan lanjutan ada yang diberikan secara klasikal. Pembinaan seharusnya membantu pengusaha membuka jaringan dan memperluas akses pasar. Pembinaan dapat dilakukan dengan menjalin kemitraan perusahaan mikro dengan perusahaan menengah dan besar yang sudah maju.

Variabel tenaga kerja berpengaruh nyata terhadap pendapatan usaha TKI Purna. Hal ini dapat dilihat dari nilai t_{hitung} sebesar 2,029 yang lebih besar dari nilai $t_{(0,05;101)}$ sebesar 1,9. Hal ini sesuai dengan teori produksi yang menyatakan bahwa semakin banyak tenaga kerja yang digunakan, maka semakin banyak produksi yang bisa dihasilkan. Semakin banyak produksi yang dihasilkan, maka pendapatan yang diperoleh juga akan semakin besar. Koefisien regresi sebesar 44.757,562 berarti bahwa setiap penambahan tenaga kerja sebanyak 1 orang, akan meningkatkan pendapatan sebesar Rp44.757,562 per bulan. Menambah tenaga kerja dapat dilakukan oleh pengusaha. Pertambahan tenaga kerja akan meningkatkan produksi. Dampak dari peningkatan produksi ini yang belum dapat diantisipasi oleh pengusaha. Peningkatan produksi seharusnya dilakukan karena adanya peningkatan permintaan. Bagaimana meningkatkan permintaan terhadap produk yang dihasilkan belum diketahui oleh pengusaha. Sebanyak 85% responden tidak mengetahui bagaimana caranya meningkatkan permintaan terhadap produknya, sisanya 15% mengetahui salah satu cara yaitu dengan meningkat-

Tabel 5. Jumlah Responden yang Mendapat Bantuan Kredit

Jumlah Kredit (Rp)	Jumlah Responden	Pemberi Kredit
550.000,00	4	LP ₂ KM
700.000,00	1	Bank Mandiri
1.000.000,00	4	LP ₂ KM
2.000.000,00	1	BNI 46
5.000.000,00	1	BNI 46
5.000.000,00	1	BRI
5.000.000,00	2	BNI Syariah
6.000.000,00	1	BRI
7.000.000,00	2	Bank Mandiri
7.000.000,00	1	BRI
10.000.000,00	1	Jamsostek
10.000.000,00	2	Bank Mandiri
7.000.000,00	1	Jamsostek
20.000.000,00	1	Keluarga
40.000.000,00	1	BRI
75.000.000,00	1	Jamsostek
Total	25	

kan kualitas hasil. Jika hasil ini dikaitkan dengan bimbingan teknis, maka materi analisis perilaku konsumen dapat dijadikan sebagai salah satu materi dalam bimbingan teknis.

4. Simpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Usaha TKI Purna berperan terhadap perluasan kesempatan kerja. Dengan asumsi setiap TKI yang ditempatkan mulai tahun 2005 membuka usaha, tingkat pengangguran di Sumatera Utara tahun 2008 berkurang sebesar 20,53%. Usaha TKI Purna berperan terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat di bidang jasa, industri, perdagangan, dan pertanian/peternakan serta berperan dalam pengembangan ekonomi lokal (*Local Economic Development/LED*). Usaha TKI Purna menciptakan pendapatan baik untuk pengusaha maupun pekerja dan sektor-sektor lain yang mendukungnya. Selain itu, dana remitansi yang dikirimkan oleh TKI dari luar negeri secara makro mampu menggerakkan perekonomian di perdesaan. Pendapatan dari usaha dan dana remitansi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, (2) Variabel modal dan tenaga kerja berpengaruh terhadap pendapatan usaha TKI Purna, sedangkan variabel pendidikan, lamanya mendapat bimbingan teknis dan pembinaan lanjutan tidak berpengaruh terhadap pendapatan usaha TKI purna. Penambahan modal sebesar Rp1.000.000,00 akan meningkatkan pendapatan sebesar Rp201.000,00 per bulan, dan penambahan tenaga kerja sebanyak 1 orang, akan meningkatkan pendapatan sebesar Rp44.757,562 per bulan.

Sebagai implikasi hasil penelitian, untuk meningkatkan pendapatan usaha TKI Purna diperlukan: (1) perbaikan materi bimbingan teknis. Bimbingan teknis yang diberikan selama ini masih bersifat umum. Materi pelatihan teknis sebaiknya diberikan bervariasi, sesuai dengan jenis usaha TKI purna. Bimbingan teknis sebaiknya mencakup bagaimana cara menganalisis perilaku konsumen untuk meningkatkan permintaan terhadap produk yang dihasilkan, (2) perbaikan sistem pembinaan lanjutan. Pembinaan lanjutan yang dilakukan masih bersifat klasikal belum mampu mempengaruhi pendapatan pengusaha. Pembinaan lanjutan yang

dilakukan seharusnya dapat membantu pengusaha membuka jaringan dan memperluas akses pasar, dan (3) manajemen keuangan. Pemerintah dapat membantu manajemen keuangan pengusaha agar dapat memenuhi persyaratan dari bank untuk mendapatkan dana, sehingga dapat meningkatkan modal usaha.

Daftar Acuan

- Badan Pusat Statistik. (2008). *Sumatera Utara dalam angka 2008*. Badan Pusat Statistik dan Diseminasi Statistik.
- Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan TKI. (2009). *Menaungi kepentingan TKI*. Diunduh 19 Desember 2009 dari bnp2tki.go.id.
- Bank Indonesia. (2008). *Hasil survey nasional pola remitansi TKI*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Sumut. (2008). *Realisasi Penempatan TKI ke Luar Negeri Tahun 2008*.
- Faiqoh Z.A. (2009). *Analisis pengaruh remitansi TKI terhadap kehidupan ekonomi Indonesia*. Undergraduate Thesis, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Koutsoyiannis, A. (1977). *Theory of econometrics*. United Kingdom: The Macmillan Press Ltd.
- Pusat Humas Depnakertrans. (2009). *Remitansi tenaga kerja Indonesia naik 30 persen di masa lebaran*. Migrant Care. Diunduh 15 Desember 2009 dari <http://www.nakertrans.go.id/news.html284naker>.
- Rosid. (2000). *Manajemen Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi*. Pusat Pengembangan Bahan Ajar-UMB. Diunduh 9 Mei 2009 dari http://pksm.mercubuana.ac.id/new/elearning/files_modul/31013-7-451881337985.doc.
- Teviana, T. (2002). *Peran tenaga kerja Indonesia terhadap pengembangan wilayah asal Indonesia*. Tesis, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara.